

MANUFACTURING
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DPMPSTP PROVINSI SULAWESI TENGAH

No.	Dasar Hukum	Sarana Prasarana	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>1. Undang-Undang No. 3 Thn 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Thn 1948 No. 23 dari RI untuk Seluruh Indonesia.</p> <p>2. Undang-Undang no. 22 tahun 1954 tentang Undian</p> <p>3. Undang-Undang No. 62 Tahun 1959 tentang Kewarganegaraan RI.</p> <p>4. Undang-undang No. 9 Th 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;</p> <p>5. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan</p>	<p>1. Ruang layanan Informasi dan Pengaduan;</p> <p>2. Ruang Laktasi/Nursery;</p> <p>3. Ruang Bermain Anak;</p> <p>4. Ruang Pemrosesan;</p> <p>5. Ruang Desk / Tim Teknis;</p> <p>6. Ruang Layanan Data Entry;</p> <p>7. Ruang Server;</p> <p>8. Ruang Tunggu;</p> <p>9. Ruang Penyerahan;</p> <p>10. Ruang Ibadah / Musholla;</p> <p>11. Layanan Aplikasi Online;</p> <p>12. Wifi / Hotspot;</p> <p>13. CCTV;</p> <p>14. Area Merokok;</p> <p>15. Kursi Roda;</p> <p>16. Tempat Parkir Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat);</p>	<p>1. SMA 4 Orang;</p> <p>2. Akademi (D3) 1 Orang;</p> <p>3. Sarjana (S1) 7 Orang;</p> <p>4. Master (S2) 1 Orang.</p>	<p>a. Dilakukan oleh Seksi Perizinan dan Non Perizinan I, II, dan III;</p> <p>b. Dilakukan oleh Seksi Pengaduan, Seksi Kebijakan dan Seksi Pelaporan Layanan;</p> <p>c. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>d. Dilaksanakan secara kontinyu;</p> <p>e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan</p>	<p>1. Petugas informasi / Penerimaan berkas 2 orang;</p> <p>2. Petugas Verifikasi /berkas 2 orang;</p> <p>3. Petugas Pemrosesan 4 orang;</p> <p>4. Petugas Locket Penyerahan / Pengambilan berkas 3 orang;</p> <p>5. Petugas Arsip berkas 2 orang.</p>	<p>1. Setiap Petugas Pelayanan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>2. Setiap Petugas Pelayanan dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan,</p>	<p>1. Dokumen yang diterima dijamin asli;</p> <p>2. Dokumen yang terdaftar dengan nomor seri tertentu dan barcode, dilengkapi stempel dan tanda tangan asli;</p> <p>3. Pengawasan ruang layanan dan parkir CCTV;</p> <p>4. Jaminan keamanan data,profil,</p>	<p>1. Dilakukan evaluasi setiap 1 bulan sekali;</p> <p>2. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan sekali;</p> <p>3. Dilakukan pengawasan danpengelolaan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>

	<p>mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);</p>	<p>17. Toilet; 18. Kotak Pengaduan; 19. Lifleat Informasi Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 20. Mekanisme Perizinan, Pengaduan dan SPIPISE; 21. Lifleat Visi & Misi, Motto, Malumat Pelayanan dan Jam Pelayanan; 22. Lifleat Janji Pelayanan; 23. Kantin; 24. Payung; 25. Komputer; 26. Printer.</p>		<p>Reward/Penghargaan;</p> <p>f. Dilakukan pengawasan kedisiplinan pegawai melalui CCTV;</p> <p>g. Dilakukan pengelolaan pengaduan berjenjang melalui atasan langsung petugas;</p> <p>h. Dilakukan absensi kehadiran pelaksana.</p>		<p>isyarat dan atau keutungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>pemohon melalui ruang arsip dan keamanan digital.</p>	
6.	<p>Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan;</p>							
7.	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan</p>							
8.	<p>Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak</p>							
9.	<p>Undang – ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p>							
10.	<p>Undang-Undang No. 7 Thn 1981 tentang Wajib Laporan</p>							

	<p>Ketenagakerjaan di Perusahaan;</p> <p>11. Undang-undang No. 8 Th. 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya;</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian;</p> <p>14. Undang - Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;</p> <p>15. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian</p> <p>16. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);</p> <p>17. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup;</p> <p>18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;</p> <p>19. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak</p> <p>20. Undang-Undang No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan;</p> <p>21. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>22. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tentang, Tambahan Lembaran Negara</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	Republik Indonesia Nomor 4389);							
23.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Panas Bumi;							
24.	Undang - Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;							
25.	Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;							
26.	Undang-Undang tentang Mineral Batu Bara; Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);							
27.	Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
28.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;							
29.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan							

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);							
30.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran							
31.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;							
32.	Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan							
33.	Undang-undang No.11 th 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;							
34.	Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;							
35.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;							
36.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik							
37.	Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak							

	daerah dan Retribusi Daerah;							
38.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;							
39.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;							
40.	Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;							
41.	Undang - Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;							
42.	Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;							
43.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;							
44.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Reklamasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							

45.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri;							
46.	Undang-Undang No. 07 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air;							
47.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;							
48.	Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;							
49.	Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiyaan Ikan dan Petambak Garam;							
50.	Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, tanggal 22 November 2017 tentang Pelin-dungan Pekerja Migran Indonesia;							
51.	Undang-Undang RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara							

52.	Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;							
53.	Peraturan Pemerintah No. 29 Th 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;							
54.	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat <i>Veteriner</i> ;							
55.	Peraturan Pemerintah No. 2 Th 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah;							
56.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa							
57.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan;							
58.	Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1994 tentang Pengolahan Limbah/Bahan Berbahaya dan Beracun;							

59.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;							
60.	Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Koperasi;							
61.	Keputusan Menteri Sosial No. 56/HUK/1995 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;							
62.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;							
63.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;							
64.	Peraturan Pemerintah NO. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;							
65.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan							

	<p>Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2005 Forum Kordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;</p>							
66.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;							
67.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan							
68.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan;							
69.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;							
70.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Republik Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4741);							
71.	PP No. 41 tahun 2006 tentang Izin Pernelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing,							

	Badan Usaha Asing dan Orang Asing;							
72.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;							
73.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;							
74.	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi yang telah di ubah dengan PP Nomor 70 Tahun 2010;							
75.	Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;							
76.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;							
77.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan							

78.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Khusus meliputi Sekolah Keberkatan, Sekolah Cerdas Istimewa;							
79.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;							
80.	Peraturan pemerintah no. 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;							
81.	Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan;							
82.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam sebagaimana telah diubah PP Nomor 108 Tahun 2015;							
83.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha f Tenaga Listrik;							

84.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan							
85.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;							
86.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;							
87.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;							
88.	Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2014 tentang Sungai;							
89.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;							
90.	Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;							

91.	Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;							
92.	Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan							
93.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri;							
94.	Peraturan Pemerintah Nomor 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air							
95.	Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2016 tentang Irigasi;							
96.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha							

	<p>Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;</p> <p>97. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 1973 tentang penerbitan penyelenggaraan Undian;</p> <p>98. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;</p> <p>99. Keppres No. 4 Thn 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Kerja di Perusahaan.</p> <p>100. Keppres No. 36 Thn 2002 tentang Pengesahan Konvesia ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>101. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata niaga Bahan Bakar Nabati (Biofel) sebagai Bahan Bakar lain;</p> <p>102. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

103. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atar Pepres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu;							
104. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan;							
105. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;							
106. Peraturan Presiden RI. No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;							
107. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;							
108. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP;							
109. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat							

	<p>Pemberitahuan Penelitian Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun;</p> <p>110. Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-249/MEN/82 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Tenaga Kerja WNA Pendetang pada sector Kesehatan sub sector Pelayanan Kesehatan;</p> <p>111. SK Direktur Jenderalla Peternakan Nomor 53/N.520/KPTS/DJB/1988;</p> <p>112. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 1989 tentang Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut</p> <p>113. Keputusan Menteri Sosial RI No. 40/HUK/KEP/X/1990 tentang Organisasi Sosial;</p> <p>114. SK Menteri Pertanian No. 362/KPTS/TN.120/5/1990 tentang cara pemberian usaha dan peternakan rakyat;</p> <p>115. SK Mentan Nomor 324/KPTS/Th. 120/4/1994;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>116. Surat Keputusan Mentan Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya kewilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia;</p> <p>117. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Di bawah Tanah.</p> <p>118. Keputusan Menteri Sosial No.73/Huk/2002 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin dan penyelenggaraan undian gratis; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;</p> <p>119. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455K/40/MEM/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;</p> <p>120. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum</p> <p>121. Surat Edaran MENDAGRI No. 472/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Oranga Asing, NGO dan Lembaga Asing didaerah.</p> <p>122. Kepmenperindag Nomor 334/MPP/Kep/5/2004 tentang Perubahan atas Kepmenperindag Nomor : 61/MPP/2/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau;.</p> <p>123. Kepmenperindag Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;</p> <p>124. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0045 dan Perubahannya Permen</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>ESDM Nomor : 0046 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;</p> <p>125. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;</p> <p>126. Keputusan Menteri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal</p> <p>127. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;</p> <p>128. Peraturan Menteri Pertanian No. 4 / Permentan / OT. 140/12/2007, tentang Pengawasan Obat Hewan;</p> <p>129. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja DEPDAGRI;</p> <p>130. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III2008</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;</p> <p>131. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.05/MEN/2008 tentang usaha Perikanan Tangkap;</p> <p>132. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan;</p> <p>133. Permenperin Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI</p> <p>134. Keputusan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas</p> <p>135. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008, tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Kesehatan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>136. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER. 09/MEN/V/ 2009, tanggal 7 Mei 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;</p> <p>137. Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;</p> <p>138. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</p> <p>139. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>140. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012;</p> <p>141. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;</p> <p>142. Permenperin Nomor 71/M-IND/PER/7/2009 tentang Jenis Industri yang Mengolah dan Menghasilkan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Jenis Industri Teknologi Tinggi yang Strategis</p> <p>143. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha di bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

144. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;							
145. Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang pedoman teknis kawasan industri;							
146. Peraturan Menteri Pertanian No.39/OT.140/6/2010 tentang pedoman Perizinan Budidaya Tanaman Pangan							
147. Permenperin Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian							
148. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;							
149. Permenkes RI Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011, Tentang Pedagang Besar Farmasi;							

<p>150. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</p> <p>151. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;</p> <p>152. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Air Tanah;</p> <p>153. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>154. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;</p> <p>155. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri berdasarkan Izin Operasi;</p> <p>156. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>157. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan</p> <p>158. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2013;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>159. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol Dan Label LB3;</p> <p>160. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Izin Reklamasi dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>161. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;</p> <p>162. Peraturan Menteri ESDM No 27 tahun 2013 tentang Tata Cara penetapan harga divestasi saham, serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>163. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;</p> <p>164. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Nomor 35 Tahun 2013 dan Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan;</p> <p>165. Peraturan Menteri ESDM No. 36 tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;</p> <p>166. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;</p> <p>167. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;</p> <p>168. Peraturan Menteri Kehutanan No. P16/Menhut-II/2014 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan</p> <p>169. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;</p> <p>170. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2014 tentang Izin Reklamasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>171. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;</p> <p>172. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;</p> <p>173. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Permenkes No 1148 Tahun 2011 Tentang PBF</p> <p>174. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

175. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 tahun 2014 tentang surat Laik Operasi Kapal Perikanan;							
176. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pembudidayaan Ikan;							
177. Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;							
178. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;							
179. Peraturan Menteri Perhubungan 60 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal							
180. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2014 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan;							

181.	Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi							
182.	Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 75/MDAG/PER/10/2014 tentang Perdagangan Bahan Berbahaya;							
183.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara;							
184.	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-Set/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.17/PHPL-Set/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;							
185.	Peraturan Menteri Pertanian ATR/BPN No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi							

186.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;							
187.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;							
188.	Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No. P13/MENLHK-II/2015 Tentang Izin Usaha Industri Hasil Hutan							
189.	Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015							
190.	Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Teknis dalam Rangka Penanaman Modal							
191.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan							

	<p>Rakyat No. 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;</p> <p>192. Peraturan Menteri dan Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;</p> <p>193. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Pemanfaatan Hutan;</p> <p>194. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015</p> <p>195. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>196. Peraturan Menteri Perhubungan 53 Tahun 2015 Ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan 60 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal</p> <p>197. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>198. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu</p> <p>199. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka pengenal Importir;;</p> <p>200. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>201. PM. 74 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Kepelabuhan</p> <p>202. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;</p> <p>203. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas PM. No 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi</p> <p>204. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;42</p> <p>205. Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;</p> <p>206. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;</p> <p>207. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Hasil Pengukuran Ulang;</p> <p>208. Perdirjen PSKL Nomor 11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan;</p> <p>209. Perdirjen PSKL Nomor 12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>210. Perdirjen PSKL Nomor 13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verivikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat;</p> <p>211. Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Lelang Wilayah;</p> <p>212. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan;</p> <p>213. Permen Naker RI No : 39 Thn 2016 ttg Penempatan Tenaga Kerja;</p> <p>214. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.54/MenLHK/Setjen/Kum. 1/6/2016 tanggal 22 Juni Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu atau Hasil</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara;</p> <p>215. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;</p> <p>216. Peraturan Menteri LHK Nomor : 83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;</p> <p>217. Permen Koperasi dan UKM Nomor : 02/Per/M.KUKM/II/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi & UKM Nomor : 15/Per/M.KUKM/IX2008 Tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi</p> <p>218. Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

219.	Permenkes No 30 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Permenkes 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang PBF							
220.	Peraturan Menteri ESDM No 34 tahun 2017 tentang perizinan bidang pertambangan minerba;							
221.	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;							
222.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);							
223.	Peraturan Menteri ESDM No 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;							
224.	Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;							

	<p>225. Peraturan Menteri ESDM No 22 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;</p> <p>226. Keputusan Menteri ESDM nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubara;</p> <p>227. Keputusan Kepala Bapedalda No.1 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan LB3;</p> <p>228. Peraturan Daerah Provinsi Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali;</p> <p>229. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut dan Kepelabuhan</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

230.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;							
231.	Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2009 Tentang Irigasi;							
232.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu							
233.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 sampai dengan tahun 2033;							
234.	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;							
235.	Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;							

	<p>236. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 Tentang Sungai;</p> <p>237. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);</p> <p>238. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>239. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 86);</p> <p>240. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	(KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah							
	241. Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2010 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;							
	242. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.							